

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

WILDAN RAHIL ALFATTA
NPM: 2002110088



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

WILDAN RAHIL ALFATTA
NPM : 2002110088

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA SKPD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021-2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :



Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si
NIK: 19740221 200801 2 001

Pembimbing II

Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK: 19651031 199406 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Faridzi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

WILDAN RAHIL ALFATTA
NPM : 2102110082

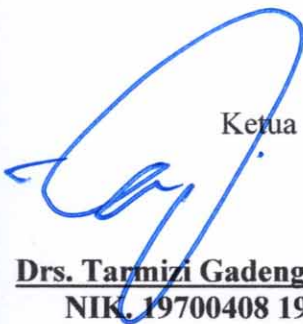
Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA SKPD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021-2023**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 03 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Anggota


Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si
NIK: 19740221 200801 2 001

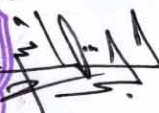
Anggota


Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK: 19651031 199406 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi




Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”



WILDAN RAHIL ALFATTA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wildan Rahil Alfatta**
NPM : 2002110088
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021-2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

Banda Aceh, 19 Agustus 2024



ng Menyatakan,

WILDAN RAHIL ALFATTA

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukurku padaMu Ya Allah, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan kasih sayang, nikmat Islam dan Iman di jalanMu sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh”** dapat terselesaikan dengan banyak kemudahan dan pertolongan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Junaidi dan Ibu Rosnita yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta para Staf Pengajar yang telah membekali penulis dengan ilmu Pengetahuan.
4. Bapak Budi Safatul Anam, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Ibu Dr. Surna Lastri, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Surya Fatma. SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak dari pertama hingga selesainya skripsi ini.
7. Pejabat Daerah dan Bendaharawan pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang telah berkenan mengisi kuesioner.
8. Buat keluarga besar di Kota Banda Aceh yang telah memberi perhatian dan dukungan finansial selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Buat sahabat-sahabat se angkatan yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalasnya dikemudian hari. *Amin.*

Banda Aceh, Juni 2024
Penulis

Wildan Rahil Alfatta

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah	9
2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah.....	9
2.1.1.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah	10
2.1.1.3 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	11
2.1.1.4 Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.1.5 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	14
2.1.2 Sistem Informasi.....	15
2.1.2.1. Pengertian Sistem Informasi.....	15
2.1.2.2. Manfaat, Fungsi dan Peranan Sistem Informasi...	16
2.1.2.3. Keunggulan dan Tantangan Sistem Informasi	19
2.1.2.4. Indikator Sistem Informasi	20
2.1.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	22
2.1.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).....	22
2.1.3.2 Komponen Sistem informasi Pemerintahan Daerah	24
2.1.3.3 Fungsi dan Tujuan Sistem informasi Pemerintahan Daerah	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 Desain Penelitian	29
3.1.1 Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian	29
3.1.2 Jenis Penelitian.....	29
3.1.3 Horizon Waktu	29

3.1.4 Unit Analisis	30
3.2 Populasi dan Penarikan Sampel	30
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	33
3.5 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	33
3.6. Pengujian Data	34
3.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	34
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik	35
3.7. Pengujian Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Karakteristik Responden.....	29
4.2 Deskriptif Variabel Penelitian	29
4.2.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan	29
4.2.2 Variabel Penerapan SIPD pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	29
4.3 Hasil Pengujian Data	29
4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	29
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	30
4.4 Hasil Analisis Regresi	29
4.4.1 Koefisiene Regresi	29
4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi	30
4.4.2 Pengujian Hipotesis.....	30
4.5 Implementasi Hasil Penelitian	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	31
Tabel 3.1 Kategori Skala Likert.....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	37
Tabel 4.2 Gambaran Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	37
Tabel 4.3 Gambaran Penerapan SIPD pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	37
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas	48
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.6. Hasil Analisis Model Regresi	54
Tabel 4.7. Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi.....	56
Tabel 4.8. Hasil Analisis Uji t.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Tabel 4.1 Grafik PP Plot Uji Normalitas	28
Tabel 4.2 Grafik Scatter Plot Heteroskedastisitas.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	70
------------	------------------------------	----

**THE EFFECT OF THE APPLICATION OF LOCAL GOVERNMENT
INFORMATION SYSTEMS (SIPD) ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTS IN THE
FINANCIAL REPORTS ON SKPD IN BANDA ACEH CITY IN 2021-2023**

**WILDAN RAHIL ALFATTA
2002110088**

Thesis Advise : 1. Dr. Surna Lastri, SE, M.Si
2. Surya Fatma, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the application of the Local Government Information System (SIPD) on the quality of financial reports on SKPD in Banda Aceh City both partially and simultaneously. The population in this study were all Heads of Finance Subdivisions and Expenditure Treasurers in 33 SKPDs of the Banda Aceh City Government, totaling 66 respondents or each SKPD representing 2 samples. The sampling technique used is the Saturated Non Probability Sampling technique (census) in which all members of the population are sampled. The results of the study explained that SIPD had a significant effect on the quality of financial reports in the Banda Aceh City government SKPD with a t value $(5.430) > t \text{ table } (1.986)$ with a probability value of 0.000 or the limitation of the significance value of the effect < 0.05 . The role of SIPD in influencing the quality of financial reports on SKPD in Banda Aceh City is 0.315 or 31.5% while the rest (residual value) is 0.685 or 68.5%, this condition explains the role of SIPD is still very small and many other variables contribute to the quality of financial reports such as the quality of human resources, ethics, training and the Internal Control System (SPIP).

Suggestions for 33 SKPDs of the Banda Aceh City Government, it should be necessary to improve the procedures for using the Regional Government Information System (SIPD) which there are still several obstacles in the SKPD in Banda Aceh City and the Banda Aceh City Government SKPD needs to submit financial reports on time and in accordance with government procedures and regulations in the Banda Aceh City SKPD so that it can move the wheels of better local government performance activities.

Keywords : *Implementation of the Local Government Information System (SIPD),
Quality of Financial Reports*

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH**

**WILDAN RAHIL ALFATTA
2002110088**

Pembimbing : 1. Dr. Surna Lastri, SE, M.Si
2. Surya Fatma, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Subbagian Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran pada 33 SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 66 responden atau masing-masing SKPD mewakili 2 sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling Jenuh (sensus) yang dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menjelaskan SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai t hitung (5,430) > t tabel (1,986) dengan nilai probabilitas 0,000 atau batasan nilai signifikansi dari pengaruh tersebut < 0,05. Peran SIPD dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh sebesar 0,315 atau 31,5% sementara sisa (nilai residu) sebesar 0,685 atau 68,5%, kondisi ini menjelaskan peran dari SIPD masih sangat kecil dan banyak variabel lainnya yang ikut mendukung kualitas laporan keuangan tersebut seperti kualitas SDM, etika, pelatihan serta Sistem Pengendalian Intern (SPIP).

Saran bagi 33 SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh, sebaiknya perlu memperbaiki prosedur penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terdapat beberapa kendala pada SKPD di Kota Banda Aceh dan SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh perlu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah di SKPD Kota Banda Aceh sehingga dapat menggerakkan roda aktivitas kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

Kata kunci : *Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kualitas Laporan Keuangan.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa ini kebutuhan anggaran dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah di seluruh daerah Kabupaten Kota terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas terhadap peran dan fungsi pemerintah terutama akuntabilitas finansial. Untuk itu pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyusun, menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Anwar, 2021:)

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam bentuk pelaporan adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Halim, 2012:79).

Informasi keuangan pemerintah merupakan perangkat yang diperlukan dalam pemerintahan demokrasi yang semakin terbuka. Informasi tersebut salah satunya diperoleh dari laporan keuangan yang berkaitan dengan tanggungjawab mengenai pelaksanaan program kerja anggaran yang akan disampaikan kepada DPRD (Regar 2012:1). Agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna khususnya Lembaga Legislatif sebagai wakil rakyat, maka kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normative yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan (Amin 2019:156)

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan para penggunanya. Kualitas laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi 4 (empat) karakteristik kualitatif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Amin 2019:156). Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipahami, dan informasi tersebut relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian kualitas laporan keuangan juga berkaitan dengan materialistik yaitu adanya ambang batas kesalahan yang dapat diterima, informasi tersebut netral atau tidak ada kepentingan sekelompok orang dan disajikan secara lengkap untuk seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Informasi tersebut memenuhi aspek kehandalan atau bebas dari aspek yang menyesatkan dan disajikan dengan jujur serta dapat dibandingkan berdasarkan periode (Bastian 2010:98).

Sejalan dengan dilaksanakannya bimbingan teknis dan pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh badan pengawasan internal pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia terus mengalami perbaikan sebagaimana tecermin dari jumlah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang terus meningkat jumlahnya (BPK RI, 2023). Kondisi tersebut juga terjadi dilingkungan kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh adalah salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut didukung oleh 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 21 Dinas, 5 Badan, 2 Kantor dan 5 Sekretariat (Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2023). Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, setiap SKPD menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi SKPD untuk tahun yang direncanakan, kemudian menyampaikan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD untuk mendapatkan alokasi anggaran belanja dan pendapatan sebagaimana yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui peran dan fungsi SKPD merupakan aset yang bisa digunakan berdasarkan kemanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar dikelola dengan baik dan bebas dari kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus melaporkan pengelolaan keuangannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD (Din, 2021:2).

Sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan daerah maka seluruh SKPD di Kota Banda Aceh harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah yang berada di atasnya. Laporan keuangan tersebut

terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Data BPK Laporan Keuangan yang disampaikan Pemerintah Kota Banda Aceh selama sejak tahun 2009-2022 telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No 71 tahun 2010, kondisi ini terlihat selama periode tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan yang disampaikannya (BPK, 2023). Banyak faktor yang ikut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk diantaranya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Hendri dan Erinos 2020).

Sistem informasi pada instansi pemerintah adalah salah satu sumber daya organisasi yang didesain dan digunakan oleh pejabat daerah, Bendaharawan dan bahkan staff Aparatur Sipil Negara untuk pengambilan keputusan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Sistem informasi tersebut merupakan suatu proses yang menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak dengan melibatkan manusia/personel untuk melakukan proses pengumpulan data, memproses, menyimpan serta menyajikan informasi (Rahman *et al.*, 2023: 3). Hadirnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjadi landasan awal yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan sistem informasi yang terintegrasi. Pasal 391 menjelaskan pemerintah daerah harus menyediakan sistem informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah (Saputra, *et al.*, 2023:36).

Sebelum keluarnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA). Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan SIMDA. Tujuan pengembangan program aplikasi ini adalah untuk membantu pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi keuangan dan kinerja tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang berkualitas (BPKP, 2018). Namun dengan hadirnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 sejalan dengan semakin kompleks kegiatan pengelolaan keuangan serta semakin besarnya tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, membuat pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel. Penggunaan sistem informasi pada Pemerintahan Daerah yang lebih terintegrasi, inovasi dan berkualitas kemudian diperbaharui melalui hadirnya Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Fauzi *et al*, 2023:30). Sejumlah pelatihan intensif mengenai cara penggunaan maupun pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga diberikan.

Menurut Permendagri Nomor 70 tahun 2019 menjelaskan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. Sementara informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta

penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik (Permendagri Nomor 70 tahun 2019). Untuk meningkatkan kemudahan penyampaian informasi kepada masyarakat, serta terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maka pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD sebagai pergantian dari SIMDA (Nasution dan Nurwani, 2021). Kondisi ini juga menjadi keharusan bagi pemerintah daerah Kota Banda Aceh.

Menghadapi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terus meningkat sejalan dengan terjadinya pembaharuan sistem penganggaran daerah/negara, membuat SKPD di Kota Banda Aceh membutuhkan modul Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk membuat dan mengambil suatu keputusan mengenai perencanaan anggaran, pencatatan transaksi berdasarkan bukti-bukti yang ada serta menyampaikan informasi keuangan daerah dalam kerangka pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui modul yang tersedia dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah masing-masing SKPD dapat memonitor jumlah aset lancar maupun aset tetap serta berbagai transaksi keuangan lainnya yang telah di realisasi. Melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, masing-masing SKPD di Kota Banda Aceh juga dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah secara cepat dan tepat waktu. Dengan adanya SIPD, seluruh SKPD di Kota Banda Aceh dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel (Nasution dan Nurwani, 2021).

SIPD merupakan suatu sistem berbasis online yang memberi kemudahan bagi SKPD di Kota Banda Aceh dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya SIPD waktu pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih cepat. SIPD yang diterapkan oleh SKPD di Kota Banda Aceh telah dapat menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. SIPD juga telah dapat membuat informasi yang dihasilkan untuk mengambil keputusan akan dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat diperbandingkan (Balqis dan Zuhriзал, 2021). Aspek-aspek tersebut akan dapat membuat laporan keuangan yang disajikan akan lebih berkualitas.

Dari aspek tersebut dapat dipahami, mutu data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dimengerti oleh pengguna SIPD yang terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan penerapan SIPD ini. Kemudian dari aspek relevansi, penginputan kegiatan yang dilakukan sistem tersebut sudah terprogram. Kondisi ini menyimpulkan bahwa sistem yang telah diterapkan sudah saling berkaitan dan dibutuhkan sehingga memenuhi syarat relevansi dalam pemenuhan kebutuhan (Balqis dan Zuhriзал, 2021).

Dari aspek kehandalan informasi, SIPD dapat menyajikan informasi yang bebas dari kesalahan karena input data pada SIPD ini telah dikendalikan atau terverifikasi, sehingga data yang tidak sesuai secara otomatis akan ditolak. Namun penerapan SIPD ini masih banyak kesalahan yang terjadi saat penginputan. Bukan hanya masalah jaringan, akan tetapi sistem yang sering error juga menghambat pekerjaan pengguna. Kemudian dari aspek dapat diperbandingkan, laporan perencanaan dan realisasi penganggaran yang dihasilkan dalam SIPD dapat diperbandingkan dengan informasi lainnya atau informasi sebelumnya. Sistem

informasi akan meningkatkan kinerja individu dalam menghasilkan laporan yang berkualitas yang terdiri dari atribut akurasi, tepat waktu, kelengkapan, dan konsistensi. Aplikasi SIPD pada instansi pemerintah dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dibandingkan data manual (Dewi, 2023).

Berdasarkan pengamatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banda Aceh bahwasannya kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh mengalami penurunan sejak penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada awal tahun 2021. Penyebabnya dikarenakan penerapan SIPD yang masih belum optimal, Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pada kualitas laporan keuangan adalah kesalahan yang masih terlihat pada penginputan data dan *human error*, dan masih terjadi kendala seperti kurangnya pelatihan bagi staf dan masalah teknis yang menyebabkan sistem tidak berpotensi maksimal, sehingga penerapan SIPD di SKPD sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Semestinya penerapan SIPD ini sudah tidak banyak lagi kekurangan, namun keberhasilan penerapan SIPD sangat tergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, serta pengawasan dan control internal yang kuat, maka dapat menyelesaikan berbagai macam kendala dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian masalah penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh tahun 2021-2023”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu manajemen pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini dapat melengkapi penemuan-penemuan baru dalam bidang penelitian akuntansi dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lanjutan.

- Bagi Penulis

Meningkatnya wawasan dan kemampuan berfikir dalam memahami pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, manfaat penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di kota Banda Aceh tahun 2021-2023.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban pemerintahan atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan beserta kinerja pemerintah pada suatu periode tertentu, berikut perkembangannya dari periode ke periode (Masnila, 2021:16). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Karunia dan Azas (2023:38) laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenal posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Anwar (2021:21) menjelaskan laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengertian laporan keuangan sektor publik menurut Bastian (2006) dalam Permana dan Ida (2020:25)

laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Laporan Keuangan menurut Azaluddin · (2023 :21) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Lebih lanjut Azaluddin · (2023 :36) menjelaskan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dikatakan sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan secara lengkap (full disclosure) informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang paling dibutuhkan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) dari laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengungkapkan semua informasi yang relevan seperti yang disyaratkan dalam SAP. Karena APBD merupakan dana publik, maka publik berhak mengetahuinya secara lengkap dan tidak menyesatkan.

Laporan Keuangan Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah terkait pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

2.1.1.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan laporan keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial (*financial reports*), dan Catatan atas Laporan Keuangan. LRA dan LPSAL dikelompokkan sebagai laporan pelaksanaan anggaran (berbasis kas), sedangkan LO, LPE, Neraca, dan LAK dikelompokkan sebagai laporan finansial. Perincian dari laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan kegiatan pemerintah yang dimonetisasi dalam nilai rupiah sebagai bentuk realisasi atas kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). LRA menunjukkan ikhtisar atas sumber, alokasi, dan penggunaan

sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
4. Laporan Operasional.
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Arus Kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Sesuai dengan jenis transaksi keuangan yang dihasilkan, maka Laporan

Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:

- a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

- b) SKPD Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

2.1.1.3 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Effendi, 2021:10).

Lebih lanjut Effendi (2021:11) menjelaskan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

d. Keseimbangan

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah : Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi ,dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatanpemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Effendi (2021:12) tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Namun secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas APBD yang dipercayakan kepadanya.

2.1.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penyusunannya, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan ini menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Masnila, 2021:15).

Menurut Tambunan dan Bincar (2023:18) dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan adalah

kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dilihat dari seberapa jauh dan lengkapnya catatan keuangan yang disiapkan sampai membentuk nilai informasi keuangan secara sistematis, kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi (tidak ada transaksi yang terlewatkan dari catatan akuntansi), komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang dipakai.

Anwar (2021:23) menjelaskan kualitas laporan keuangan adalah informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai dengan kata lain informasi yang disajikan mempunyai nilai karakteristik kualitatif yaitu relevansi, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan menurut Azaluddin (2023 :37), adalah sejauhmana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur, hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan keuangan tersebut.

Kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normative yang dimaksud adalah relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan dimengerti, lengkap, netral dan penyajiannya jujur.

2.1.1.5 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Bastian (2013:94-96), dalam Tambunan dan Bincar (2023:21) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya:

1. Dapat dipahami,

2. Relevan,
3. Materialitas,
2. Keandalan/reliabilitas,
3. Penyajian jujur,
4. Substansi mengungguli bentuk,
5. Netralitas,
6. Pertimbangan sehat,
7. Kelengkapan, dan
8. Dapat dibandingkan.

Lebih lanjut Tambunan dan Bincar (2023:8) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan mencerminkan kualitas laporan keuangan yang mana di dalamnya mengandung lima karakteristik, yaitu:

1. Dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Relevan, karena disajikan tepat waktu, memiliki nilai umpanbalik dan nilai prediksi;
3. Dapat diandalkan/reliabel, artinya bersifat netral dan representatif;
4. Dapat diperbandingkan, karena adanya konsistensi data yang disajikan;
5. Secara material manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Masnila (2021:16) menjelaskan indikator karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Tepat waktu.
- b. Lengkap
- c. Andal.
- d. Netralitas
- e. Dapat dibandingkan.
- f. Dapat dipahami.

2.1.2 Sistem Informasi

2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi terdiri dari sistem dan informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan yang bekerja sama dengan aturan yang sistematis dan membentuk persatuan untuk pencapaian suatu tujuan. Sedangkan Informasi merupakan sekumpulan fakta atau data yang dikelola,

sehingga memiliki daya guna bagi penerimanya. Dengan demikian Sistem Informasi ialah suatu alat yang bermanfaat untuk menyimpan, mengumpulkan, dan memproses sebuah informasi sehingga mudah untuk diterima si pengguna (Saputra, *et al.*, 2023:2).

Sistem informasi menurut (Saputra, *et al.*, 2023:2) merupakan sebuah kumpulan prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan distribusikan kepada pemakai. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dipertemukan pada kebutuhan pemrosesan transaksi harian. Sistem informasi menurut Sudipa *et al.*, (2023:1) adalah sebagai berikut:

Sistem informasi adalah kumpulan dari sebuah proses, prosedur serta alat yang saling memiliki relasi serta yang telah terkoordinasi dalam melakukan pengumpulan, memproses, menyimpan, mengambil, melakukan analisis serta pula menyampaikan informasi dalam membantu dalam pengambilan keputusan, memecahkan masalah serta pula dalam mencapai tujuan dari organisasi. Sistem informasi memainkan peranan penting didalam berbagai bidang, seperti Pemerintahan, Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya. Didalam membantu organisasi agar menjadi lebih efisien dan efektif dalam mempergunakan informasi dalam mencapai tujuannya.

Sistem informasi (SI) menurut Ariana *et al.*, (2023:1) adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau menjalankan suatu aktivitas bisnis atau organisasi. Sistem informasi melibatkan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sudipa *et al.*, (2023:1) mengemukakan pengertian sistem informasi dari berbagai pendapat ahli, sebagai berikut:

1. Gordon B. Davis mengemukakan bahwa sistem informasi ialah kumpulan dari proses serta sumber daya yang digunakan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, melakukan pengiriman dan

juga menyajikan sebuah informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen.

2. A Byen menyatakan bahwa sistem informasi ialah sekumpulan dari komponen yang akan bekerja sama dalam memproses sebuah informasi serta mempergunakannya dalam menunjang dan memenuhi tujuan organisasi.

Lebih luas Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Yoraeni etal.,

(2023:2) adalah sebagai berikut:

SIM merupakan seperangkat gabungan untuk prosedur mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, SIM merupakan sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) melibatkan perangkat lunak, hardware, data, prosedur, dan personil yang terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. SIM merupakan suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Sistem Informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan tanpa adanya kesalahan oleh suatu organisasi atau entitas ekonomi. Sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi transaksi keuangan bagi pengguna. Sementara sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi keuangan secara umum dan non keuangan. Begitu juga untuk sistem informasi lainnya yang berbeda.

2.1.2.2 Manfaat, Fungsi dan Peranan Sistem Informasi

Pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai bidang dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi, menunjang dan mempermudah aktifitas pelaksanaan

tugas/pekerjaan pada semua tingkatan organisasi, agar pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dicapai secara maksimal, efektif, dan efisien. Sistem informasi yang ideal sebenarnya bukan dilihat dari besarnya biaya atau modal untuk membuat sistem tersebut, namun lebih pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara biaya (cost) yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh, sehingga sistem informasi seharusnya dibuat dengan menerapkan biaya yang hemat, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas, serta dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian manfaat yang diperoleh akan lebih besar dari investasi atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem tersebut (Rahman *et al.*,2023: 7).

Sistem Informasi memiliki manfaat yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Adapun manfaat yang dimiliki oleh sistem informasi menurut Sudipa *et al.*, (2023:3) ialah:

1. Mempercepat Proses Bisnis
Sistem informasi mempunyai manfaat pada bidang bisnis dalam mempercepat bantuan kepada proses bisnis yang dijalankan dengan memfasilitasi informasi yang cepat, akurasi tinggi serta informasi terkini dalam membantu pengambilan keputusan serta membantu mengambil jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan yang ada.
2. Meningkatkan Efisiensi
Sistem informasi pula dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi didalam membantu melakukan optimalisasi proses bisnis serta dapat mengurangi redundansi informasi yang dimiliki sebuah institusi.
3. Meningkatkan Akurasi
Pada sistem informasi dapat membantu dalam meningkatkan akurasi informasi dengan memastikan jika sebuah informasi yang sudah ada merupakan data yang up-to-date dan juga data pasti atau data yang benar.
4. Meningkatkan Kecapatan Jangkauan Informasi
Sistem informasi dapat melakukan peningkatan kecepatan jangkauan informasi dengan memfasilitasi informasi yang mudah dijangkau serta tersedia pada saat diperlukan.
5. Meningkatkan Efektivitas

Sistem informasi memiliki manfaat didalam menaikkan efektivitas pada suatu perusahaan dengan menjamin bahwa sistem informasi yang dibangun dan tersedia telah benar-benar dipakai serta dimanfaatkan.

6. Meningkatkan Kolaborasi
Sistem informasi dapat membantu didalam meningkatkan kombinasi antar departemen serta individual didalam sebuah institusi dengan mempermudah sebuah pertukaran informasi yang dilaksanakan dan juga melakukan komunikasi dengan baik.
7. Meningkatkan Keamanan
Didalam meningkatkan keamanan, suatu sistem informasi dapat membantu dengan menjamin bahwa data-data yang disimpan serta data yang diolah memiliki keamanan serta terlindung dari akses-akses data yang berbahaya.
8. Mendukung Pengambilan Keputusan
Didalam melakukan pengambilan keputusan sistem informasi dapat dimanfaatkan dengan memfasilitasi sebuah informasi yang memiliki akurasi yang tinggi, data yang up-to-date serta data yang relevan dalam membantu dalam menentukan tahapan yang tepat.

Informasi dipergunakan suatu organisasi dalam pengelolaan kegiatan yang sifatnya manajerial serta kegiatan strategi dari sebuah organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan kepada pihak luar. Kemudian Saputra, *et al.*, (2023:3) menjelaskan fungsi sistem informasi adalah sebagai berikut:.

- 1) Mempermudah manajemen, perencanaan, pemantauan, pengarahan, serta mempercayakan pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi.
- 2) Mengembangkan aplikasi, memelihara sistem dan memperbaiki produk.
- 3) Mempermudah pencarian dari satu informasi ke informasi lain.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu.
- 5) Meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di perusahaan tersebut.

Fungsi sistem informasi menurut Ariana *et al.*, (2023:2) meliputi:

1. Pengumpulan data: Sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi.
2. Pengolahan data: Data yang dikumpulkan dapat diolah dalam sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3. Penyimpanan data: Data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat disimpan dalam sistem penyimpanan yang terpusat atau terdistribusi.
4. Penyebaran informasi: Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat disebarakan ke seluruh organisasi atau kepada individu tertentu.
5. Pengambilan keputusan: Sistem informasi dapat membantu pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan akurat.

Sistem informasi manajemen (SIM) menurut Yoraeni *et al.*, (2023:8)

memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa peranan penting dari SIM:

1. Meningkatkan efisiensi operasional: SIM dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti pengolahan data, pemrosesan transaksi, dan pelaporan.
2. Meningkatkan pengambilan keputusan: SIM dapat membantu manajer dan pemimpin perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi: SIM dapat membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar departemen dan tim dalam perusahaan, dengan menyediakan platform untuk berbagi informasi dan memperbaiki proses kerja.
4. Memperbaiki pengawasan dan pengendalian: SIM dapat membantu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang rencana dan hasil yang telah di capai.
5. Meningkatkan inovasi: SIM dapat membantu meningkatkan inovasi dalam perusahaan dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang pelanggan, pasar, dan tren industri, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan bisnis mereka.
6. Mengurangi biaya: SIM dapat membantu mengurangi biaya operasional dan administrasi dalam perusahaan dengan mengotomatisasi proses dan mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi namun yang paling utama adalah meningkatkan akurasi data dan efektivitas kerja. Melalui sistem informasi, data akan masuk ke dalam sebuah sistem yang kemudian akan diolah secara terstruktur dan otomatis. Data yang realtime dan

akurat tersebut secara langsung tentu menjadi penentu keputusan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, manajer tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam memustuskan suatu tindakan yang ada.

2.1.2.3 Keunggulan dan Tantangan Sistem Informasi

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Yoraeni *et al.*, (2023:10) memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Meningkatkan efisiensi operasional: SIM dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga menghemat waktu dan biaya.
2. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik: Dengan SIM, manajer dapat mengakses informasi yang relevan dan akurat dengan cepat, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.
3. Meningkatkan visibilitas: SIM dapat memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap proses bisnis dan kinerja perusahaan, sehingga memungkinkan manajemen mengidentifikasi masalah atau kesempatan untuk perbaikan.
4. Meningkatkan kolaborasi: SIM memungkinkan karyawan untuk berbagi informasi dan bekerja secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas.
5. Meningkatkan keamanan: SIM dapat membantu memastikan keamanan dan privasi data dengan mengendalikan akses ke informasi dan menetapkan kebijakan keamanan yang ketat.
6. Meningkatkan kepuasan pelanggan: SIM dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dengan memberikan akses ke informasi yang akurat dan memberikan layanan yang lebih baik.

Disamping keunggulan penerapan Sistem Manajemen (SM) menurut Yoraeni *et al.*, (2023:11) bisa menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama jika perusahaan tidak siap untuk menghadapi perubahan yang dibutuhkan dalam hal budaya, sumber daya, dan teknologi. Beberapa tantangan penerapan sistem manajemen meliputi :

1. Biaya: Implementasi SM membutuhkan biaya yang signifikan, seperti biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, konsultan, dan

sumber daya lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat dan membuat yang tepat sebelum memulai anggaran implementasi.

2. Keterbatasan sumber daya: Penerapan SM membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia, waktu, dan teknologi. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam penerapan SM, terutama jika perusahaan kekurangan tenaga ahli atau infrastruktur teknologi yang memadai.
3. Budaya organisasi: Penerapan SM membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi dan pola pikir karyawan. Perubahan seperti ini seringkali sulit dilakukan dan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan.
4. Pengelolaan perubahan: Perubahan yang dihasilkan dari penerapan SM dapat memengaruhi organisasi secara keseluruhan dan dapat menimbulkan resistensi dari karyawan atau bagian lain dari organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi pengelolaan perubahan yang tepat.
5. Keamanan informasi: SM melibatkan penggunaan data dan informasi yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan keamanan informasi dan mengendalikan akses ke informasi yang sensitif.
6. Pemeliharaan sistem: SM perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Pemeliharaan sistem dapat memerlukan biaya dan sumber daya yang signifikan.

Sistem informasi khususnya dengan perangkat teknologi informasi akan membuat informasi akan lebih mudah dan cepat untuk diperoleh. Sistem informasi hanya dengan menggunakan satu Komputer, manajer dapat menyimpan banyak data di dalamnya tanpa adanya resiko kerusakan atau kehilangan. Perusahaan tidak perlu membeli banyak lemari untuk menyimpan data tersebut dan mengelompokkannya menurut bagian-bagian transaksi yang terjadi. Sistem informasi berbasis komputer, juga akan menghemat waktu dan biaya dan memiliki jangkauan yang luas. Hanya dengan duduk di depan komputer, manajer bisa menjangkau informasi dari berbagai tempat.

2.1.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.1.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD menurut Permendagri Nomor 70 tahun 2019 adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :

1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

Sistem informasi pemerintahan menurut Saputra, *et al.*, (2023:38) merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi, administrasi, serta pengolahan data yang menjadi informasi tentang pelaporan keuangan, pertanggungjawaban dan pembangunan daerah yang ditunjukkan kepada masyarakat dan berguna sebagai alat pengambil keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk penunjang kinerja pemerintah. Nadjib, (2023:201) menjelaskan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, mengolah dan menyajikan informasi keuangan terkait kegiatan dan posisi keuangan daerah karena menyediakan data yang akurat dan terintegrasi mengenai penerimaan, belanja, investasi, utang, dan aset daerah. SIKD memiliki peran penting dalam memahami keuangan daerah karena dapat

memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Nadjib, (2023:202) menjelaskan siklus informasi keuangan daerah dimulai dari pengumpulan data transaksi keuangan, pengolahan data tersebut melalui proses pencatatan dan pelaporan keuangan, hingga akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan.

SIKD melibatkan beberapa komponen penting, antara lain:

1. Sistem Pendukung Akuntansi: Sistem akuntansi merupakan inti dari SIKD yang mencakup proses pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta pengendalian internal. Melalui sistem akuntansi, data keuangan diorganisir dan diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen keuangan daerah.
2. Sistem Pengelolaan Anggaran: Sistem ini digunakan untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keuangan daerah. Dalam sistem ini, dilakukan pengaturan alokasi dan penggunaan dana secara efisien dan sesuai dengan prioritas kebijakan daerah.
3. Sistem Pelaporan Keuangan: Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat, masyarakat, dan lembaga audit. Melalui sistem pelaporan keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang keuangan daerah.
4. Sistem Pengendalian Intern: Sistem pengendalian intern dalam SIKD bertujuan untuk memastikan keberlangsungan integritas, keamanan, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini melibatkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah adanya penyalahgunaan, kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Akurasi dan Kualitas Informasi: SIKD yang efektif dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, terkini, dan lengkap. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami kondisi keuangan secara lebih baik dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang andal.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: SIKD yang transparan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan kepada publik dengan jelas dan terbuka. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan publik.
7. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Dengan SIKD yang terintegrasi dan efisien, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara lebih efektif. Proses pengolahan data keuangan dapat dilakukan

dengan cepat, dan informasi keuangan dapat diakses dengan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

8. Pemantauan dan Pengendalian: SIKD yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap transaksi keuangan secara lebih efektif. Hal ini membantu mencegah adanya praktik penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sistem informasi menurut Sudipa *et al.*, (2023:11) dalam bidang pemerintahan banyak mempunyai berbagai manfaat, seperti mempermudah pengelolaan data serta Informasi, menaikkan transparansi serta akuntabilitas, serta membantu didalam membuat keputusan menjadi lebih baik. Sudipa *et al.*, (2023:11) menjelaskan penerapan sistem informasi pada bidang pemerintahan:

- a. Integrated Government Information System
Sistem informasi integrated Government Information System ialah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola serta melakukan integrasi data beserta informasi pemerintahan dari banyak sektor pemerintahan, seperti halnya keuangan, Pendidikan, kesehatan dan juga lainnya.
- b. Government Financial Information System
Government Financial Information System merupakan salah satu sistem informasi yang diterapkan pada bidang pemerintahan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan, yang dimana sistem Government Financial Information System dipakai dalam mengelola anggaran serta keuangan yang ada pada institusi pemerintahan, dengan melacak pengeluaran dan juga pendapatan serta memastikan bahwa sumber daya yang dipakai sudah digunakan secara efisien.
- c. Program Planning and Monitoring
Sistem Program Planning and Monitoring ialah aplikasi yang dapat melaksanakan tugas sebagai aplikasi control serta melakukan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan dan dapat membantu dalam mengambil keputusan tentang perubahan dan juga perbaikan program.
- d. Permitting Information System
Permitting Information System merupakan sistem informasi yang digunakan didalam pemerintahan dalam melakukan pengelolaan sebuah permohonan serta menerbitkan izin serta dapat memastikan bahwa proses perijinan dapat berjalan dengan cepat serta efisien dan juga dapat meningkatkan transparansi dalam pemberian izin.
- e. Government Employee Information System
Government Employee Information System ialah penerapan sistem informasi pemerintahan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan data serta informasi bagi petugas pemerintah serta pengelolaan gaji, proses pengelolaan absensi dan juga pengembangan

karier pegawai. Didalam menerapkan informasi pada bidang pemerintahan dapat mempermudah didalam melakukan pengelolaan data serta informasi, meningkatkan efisiensi serta efektivitas didalam melaksanakan tugas pemerintahan beserta dapat membantu keputusan yang lebih baik.

SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah yang terintegrasi dan akurat pada masing-masing SKPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

2.1.3.2 Komponen Sistem informasi Pemerintahan Daerah

Muatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Fauzi, *et al* (2023:33) terdiri dari tiga komponen antara lain:

1. Informasi Pembangunan Daerah (IPD)
IPD adalah suatu sistem yang diterapkan untuk pengelolaan data dan segala informasi yang terkait dengan masalah perencanaan pembangunan daerah (termasuk di dalamnya berisi dokumen perencanaan pembangunan daerah), serta Analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah (IKD)
IKD adalah suatu sistem yang diimplementasikan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi serta digunakan untuk menyusun, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah (termasuk di dalamnya berisi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD) secara elektronik.
3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya (IPDL)
IPDL adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya, selain yang diatur dalam IPD dan IKD. IPDL secara umum akan memuat dokumen-dokumen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019.

Nadjib, (2023:204) menjelaskan secara umum, SIKD terdiri dari berbagai komponen, termasuk sistem akuntansi, sistem pelaporan keuangan, sistem penganggaran, sistem manajemen aset, serta sistem pengawasan keuangan.

Integrasi antara komponen-komponen ini memungkinkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Komponen Sistem Informasi Keuangan Daerah menurut Nadjib, (2023:207) terdiri dari:

- a. Sub sistem Pendataan: Meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah, seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban keuangan.
- b. Sub sistem Pelaporan: Meliputi penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan lainnya.
- c. Sub sistem Monitoring: Meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan daerah, termasuk pengendalian internal dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Sesuai tugas pemerintah daerah dalam pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka pendapatan dan belanja daerah maka SIPD terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah (IPD), informasi Keuangan Daerah (IKD) dan Informasi Pemerintah lainnya yang mendukung kegiatan pembangunan dan keuangan daerah.

2.1.3.3 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Penerapan sistem informasi dalam bidang pemerintahan banyak mempunyai berbagai manfaat, seperti mempermudah pengelolaan data serta Informasi, menaikkan transparansi serta akuntabilitas, serta membantu didalam membuat keputusan menjadi lebih baik (Sudipa *et al.*, 2023: 11). SIKD menurut Nadjib, (2023:204) memiliki beberapa fungsi penting dalam memahami keuangan daerah:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan: SIKD mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah, baik itu penerimaan, belanja, atau investasi. Hal ini memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data yang lengkap tentang keuangan daerah.
2. Pelaporan Keuangan: SIKD menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi

keuangan daerah, kinerja keuangan, serta arus kas yang masuk dan keluar

3. Penganggaran: SIKD digunakan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Informasi mengenai penerimaan, belanja, dan sumber daya keuangan lainnya diintegrasikan dalam SIKD untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran.
4. Manajemen Aset: SIKD mencatat informasi tentang aset daerah, termasuk tanah, bangunan, fasilitas, dan inventaris. Dengan adanya SIKD, pemerintah daerah dapat melacak aset yang dimiliki, memperbarui informasi kepemilikan, dan mengelola aset dengan lebih baik.
5. Pengawasan Keuangan: SIKD mendukung pengawasan keuangan dengan memungkinkan adanya sistem kontrol internal, audit internal, dan pemantauan terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, potensi kesalahan dan penyalahgunaan dapat diidentifikasi lebih cepat.

Nadjib, (2023:207) SIKD memiliki beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan transparansi: SIKD bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan akses yang mudah terhadap informasi keuangan yang relevan.
- b. Pengambilan keputusan yang tepat: SIKD memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan yang tepat terkait keuangan daerah, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya.
- c. Peningkatan akuntabilitas: Dengan SIKD, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara lebih baik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan: SIKD membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dengan cara yang efisien dan efektif.

Sebagaimana dengan fungsi dan tujuan sistem informasi secara umum, SIPD dapat menyediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah akan lebih mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. SIPD juga akan menghemat waktu dan biaya dan memiliki jangkauan yang luas yang terkoneksi ke berbagai unit dan bagian kerja pemerintah daerah maupun pusat.

2.1.3.4 Indikator Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem informasi memiliki sejumlah komponen yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Sudipa *et al.*, (2023:23) menjelaskan komponen-komponen sistem informasi antara lain meliputi:

1. Perangkat keras komputer
Komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Umumnya, komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan server pemrosesan paralel yang kuat dalam sistem informasi dapat menjangkau integrasi sistem computer. Hal ini yang nantinya berperan secara otomatis untuk proses input data dari komputer pengguna menuju server utama.
2. Perangkat lunak komputer
Selain perangkat keras, sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pengembangan aplikasi ini. Umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi dibagi untuk sistem dan aplikasi. Perangkat lunak dalam komputer sistem informasi dapat bertugas untuk mengelola perangkat keras, data program, dan sumber daya sistem lainnya, serta menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengontrol penggunaan grafis. Perangkat lunak aplikasi dalam sistem informasi biasanya berbentuk suatu program yang dirancang untuk menangani tugas-tugas tertentu bagi pengguna.
3. Telekomunikasi
Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portabel atau kabel seperti koneksi internet lokal area (LAN), sensor identifikasi frekuensi radio dan beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya yang mengumpulkan banyak data dan mengolahnya menjadi informasi. Informasi ini juga nantinya dapat diakses secara terintegrasi oleh semua pengguna dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet dapat menunjang kinerja sistem informasi dan memperkuat sistem keamanannya dari pihak eksternal.
4. Basis data dan penyimpanan
Sistem informasi memerlukan basis data dan ruang penyimpanan untuk membuatnya bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data yang merupakan kumpulan data saling terkait dan teratur dalam berbagai

kriteria ini menjadi penting bagi sistem informasi. Basis data ini bisa dicontohkan dari catatan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta katalog produk yang pernah ada dalam perusahaan tersebut. Basis data (database) dapat digunakan untuk mendukung operasional dan fungsi manajemen suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Adanya basis data juga dapat digunakan untuk proses evaluasi atas informasi terkini dengan data di masa lampau.

5. Sumber daya manusia dan prosedur

Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personel teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal ini ditujukan agar operasional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya prosedur penggunaan atau pengoperasian sistem informasi oleh banyak pengguna. Begitu pula nantinya diadakan pula pemeliharaan sistem informasi untuk proses otomatisasi jadwal penggajian, produksi, manajemen surat, dan lain sebagainya.

Komponen-komponen sistem informasi menurut Ariana *et al.*, (2023:1)

meliputi:

1. Hardware: Merupakan bagian fisik sistem informasi, seperti komputer, server, perangkat penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya.
2. Software: Merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam sistem informasi. Contohnya adalah sistem operasi, program aplikasi, dan aplikasi perangkat lunak khusus.
3. Data: Merupakan informasi yang diolah oleh sistem informasi, termasuk data internal dan eksternal. Data internal diperoleh dari sistem informasi internal organisasi.
4. Prosedur: Merupakan panduan atau aturan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebabkan informasi dalam sistem informasi.
5. Orang: Merupakan pengguna atau pengelola sistem informasi, seperti administrator sistem, analis sistem, pengguna akhir, dan pengguna aplikasi.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Dewi *et al.*, (2023) dengan judul Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan

mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Jauhari *et al.*, (2021) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, tetapi sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Mardani dan Entot (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian menjelaskan pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Pemerintah Kota Semarang. Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Pemerintah Kota Semarang.

Penelitian Dewi dan Mimba (2019) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan

efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Penelitian Hendri dan Erinos (2020), dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan (Dewi <i>et al.</i> , 2023)	Analisis regersi linier berganda	Pengelolaan keuangan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel bebas yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Variable terikat kualitas laporan keuangan Model analisis.	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian variabel pengelolaan keuangan

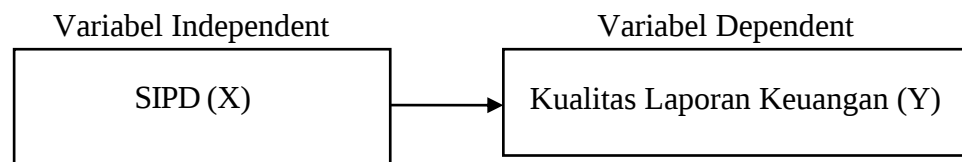
No	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Jauhari <i>et al.</i> , 2021)	Analisis regresi linier berganda	Standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan.	Variabel bebas yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah Variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan Model analisis.	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian variabel Standar akuntansi pemerintah
3	Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang. (Mardani dan Entot, 2019)	Analisis regresi linier berganda	Sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel bebas yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah Variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan Model analisis.	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian variabel Pengendalian internal
4	Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan	Analisis regresi linier sederhana	SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah	Variabel bebas yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah Variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan Model analisis.	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Keuangan (Dewi dan Mimba, 2019)				
5	Pengaruh Kualitas SDM, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Provinsi Sumatera Barat) (Hendri dan Erinos, 2020)	Analisis regresi linier berganda	Kualitas SDM dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Variabel bebas yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan Model analisis.	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian variabel kualitas SDM dan Penerapan Standar akuntansi pemerintah

2.3 Kerangka Pemikiran

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan kepada pihak tertentu. Sistem informasi bukan merupakan hal baru. Yang baru adalah sistem komputerisasinya. Komputer telah berperan meningkatkan kualitas sistem informasi karena kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat dan memungkinkan pertimbangan alternatif-alternatif yang lebih banyak dalam suatu

keputusan yang terdiri atas jumlah unsur, orang yang mempunyai bermacam-macam peran, kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, tempat kerja, wewenang pekerjaan, serta hubungan komunikasi yang mengikat bersama dalam satu kesatuan tersebut (Sutabri, 2022: 46). SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah (Dewi dan Mimba, 2019). SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi *et al.*, 2023). Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kerangka Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SKPD di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan teknik kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuesioner dan studi dokumentasi. Maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Arikunto (2013:247-248) Penelitian korelasional (*Correlational Studies*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable bebas dan variable terikat

tersebut. Adapun variabel penelitian ini adalah variabel bebas berupa Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sementara variabel terikat berupa Kualitas Laporan Keuangan.

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shoot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subjek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo (2018:94).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2016:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada Pejabat Daerah dan Bendaharawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Subbagian Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran pada SKPD di Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin di investigasikan (Wibowo, 2021:98). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah pada 33 SKPD di Kota

Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 66 pejabat atau pada masing-masing SKPD mewakili atau terpilih 2 (dua) sampel yang terdiri dari Kepala Subbagian Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran sebagai pihak yang sehari-hari terlibat dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Wibowo, 2021:101). Penarikan sampel berpedoman pada pendapat Wibowo (2021:111) yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	SKPD KOTA BANDA ACEH	Kepala Subbagian Keuangan	Bendaharawan Pengeluaran	Jumlah Sampel
1	SEKRETARIS			
	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	2
	Sekretariat Baitul Mal	1	1	2
	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	2
2	DINAS			
	Dinas Kesehatan	1	1	2
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1	1	2
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	2
	Dinas Perhubungan	1	1	2
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	2
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	1	2
	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	1	1	2
	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1	1	2
	Dinas Pariwisata	1	1	2
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	2
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	1	2

	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	2
	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	2
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	2
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	2
	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	1	2
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1	2
	Dinas Sosial	1	1	2
	Dinas Tenaga Kerja	1	1	2
	Dinas Syariat Islam	1	1	2
3	BADAN			
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2
	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	1	1	2
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	2
4	KANTOR			
	Inspektorat	1	1	2
	Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	1	1	2
	Jumlah	33	33	66

Sumber: Kantor Sekretariat Kota Banda Aceh, 2023

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling jenuh. Non Probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Adiputra *et al.*, 2021: 277). Teknik Non Probability Sampling Jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus (Adiputra *et al.*, 2021: 278)

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada

(Sekaran dan Roger, 2016: 60). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan lembar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan kepada pegawai (responden). Kuesioner yang digunakan tertutup yaitu pengisian jawaban yang sesuai dalam kategori yang telah dirancang. Kuesioner terdiri dari lima bagian dan masing-masing bagian memuat sejumlah item pertanyaan.

Kuesioner yang berisi tanggapan responden di konversikan ke bentuk data kuantitatif melalui skala likert. Peringkat skala likert memiliki interval antara 1-5. Interval skala likert dapat dilihat pada Tabel III.2

Table III.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Kurang setuju	3
4	setuju	4
5	Sangat setuju	5

3.4 Peralatan Analisis Data

Pengujian dan analisis data primer dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS Versi 20 dengan formulasi regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X = Sistem Informasi Pemerintah Daerah

b.... = Parameter Regresi

a = Konstanta (*Intercep*)

e = *Error Term*

3.5. Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan sebanyak 2 (dua) variabel yang terdiri dari 1(satu) variable bebas (*independent variable*) yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X) dan variable terikat (*dependent variable*) yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Karakteristik variable yang digunakan dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
	Dependen					
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Masnila, 2021:15).	a. Tepat waktu. b. Lengkap c. Andal. d. Netralitas e. Dapat dibandingkan f. Dapat dipahami.	1–5	Likert	B1
				1–5	Likert	B2
				1–5	Likert	B3
				1–5	Likert	B4
				1–5	Likert	B5
				1–5	Likert	B6
	Independen					
2	SIPD (X)	Kumpulan dari sebuah proses, prosedur serta alat yang saling memiliki relasi serta yang telah terkoordinasi dalam melakukan pengumpulan, memproses, menyimpan,	1. Hardware 2. Software: 3. Data 4. Prosedur 5. Orang	1–5	Likert	C1
				1–5	Likert	C2
				1–5	Likert	C3
				1–5	Likert	C4
				1–5	Likert	C5

		mengambil, melakukan analisis serta pula menyampaikan informasi dalam membantu dalam pengambilan keputusan, memecahkan masalah serta pula dalam mencapai tujuan dari organisasi (Sudipa <i>et al.</i> , 2023:1)				
--	--	---	--	--	--	--

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *reliability* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas dari suatu perangkat tes dapat diartikan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauhmana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak di ukur. Artinya instrumen dapat mengungkapkan data dari variabel secara tepat tidak menyimpang dari kenyataan sebenarnya. (Ovan dan Saputra, 2020:2).

Pengukuran validitas untuk penggunaan kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan validitas konstruk (*construct validity*) dimana sebuah kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan dikatakan valid jika setiap butir pertanyaan tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi dengan yang lainnya (Ovan dan Saputra, 2020:3). Validitas konstruk diuji melalui analisis *bivariate correlation*, jika nilai korelasi hasil uji tersebut di peroleh di atas 0,3 maka sebuah kuesioner di katakan valid atau sebaliknya (Ovan dan Saputra, 2020:3).

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlations* dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)= $n-k$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability*. Pengukuran yang memiliki *reliability* tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Reliabilitas adalah istilah yang di pakai untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih (Ovan dan Saputra, 2020:4). Menurut Aditya, *et al.*, (2022: 78) suatu hasil uji variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Model analisis harus di uji kelayakannya terlebih dahulu dengan beberapa Uji asumsi klasik yaitu terdiri dari sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang digunakan harus berdistribusi normal karena untuk uji t dan uji F mengharuskan nilai residual harus berdistribusi normal (Riyanto dan Aglis, 2020:137). Uji normalitas salah satunya dapat dilakukan dengan analisis grafik P-P Plot. Prinsip uji normalitas dengan grafik P-P Plot menurut (Riyanto dan Aglis, 2020:138). adalah

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas Riyanto dan Aglis (2020:139). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat adanya heteroskedastisitas adalah dengan grafik Plot. Kriteria penilaian yang diisyaratkan dengan Scatter Plot menurut Riyanto dan Aglis (2020:139). adalah:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dengan menggunakan parameter regresi. Dengan keputusan Hipotesis adalah:

Ho: $\beta=0$; Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh.

$\beta \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$); Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan usia (tingkatan umur), jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan golongan kepangkatan pejabat daerah dan bendaharawan yang bertugas pada SKPD Kota Banda Aceh. Responden tersebut dipilih secara stratified random sampling di 33 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berjumlah sebanyak 66 pejabat daerah dan bendaharawan atau masing-masing SKPD terpilih 2 (dua) sampel untuk pembagian kuesioner. Mereka memiliki usia (tingkatan umur), jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan golongan kepangkatan yang berbeda. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
Umur	31-35 Tahun	12	18.2
	36-40 Tahun	31	47.0
	41-45 Tahun	23	34.8
	Total	66	100,0
Kelamin	Laki-laki	58	87.9
	Perempuan	8	12.1
	Total	66	100,0
Pendidikan	DIII	8	12.1
	S1	38	57.6
	S2	20	30.3
	Total	66	100,0

Lanjutan Tabel 4.1

Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
Masa kerja	6-10 Tahun	19	28.8
	11-15 Tahun	23	34.8
	16-20 Tahun	24	36.4
	Total	66	100,0
Golongan kepengkatan	IIIa-IIIb	12	18.2
	IIIc-IIId	31	47.0
	IVa-IVb	23	34.8
	Total	66	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.1 menjelaskan dari hasil pendataan terhadap 66 pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dijelaskan bahwa sebahagian besar atau 47,0% berumur antara 36-40 tahun. Ada 34,8% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan usia antara 41-45 tahun dan selebihnya 18,2% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan berusia lebih muda dengan umur antara 31-35 tahun. Pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD di Kota Banda Aceh sebahagian besar atau 87,9% berjenis kelamin laki-laki dan hanya 12,1% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 57,6% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dan bekerja pada SKPD Kota Banda Aceh dengan latar belakang pendidikan SI. Ada 30,3% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan tingkat pendidikan S2. Selebihnya 12,1% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan tingkat pendidikan DIII. Pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata tersebut sebahagian besar atau 36,4% telah bekerja selama 16-20 tahun. Ada 28,8% dari jumlah pejabat daerah dan

bendaharawan dengan masa kerja antara 6-10 tahun. Selebihnya 34,8% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan masa kerja antara 11-15 tahun.

Berdasarkan perbedaan jenjang pendidikan dan masa kerja, maka golongan kepangkatan pejabat daerah dan bendaharawan pada SKPD Kota Banda Aceh berbeda antara satu dengan lainnya. Sebahagian besar atau 47,0% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IIIC-IIID. Ada 34,8% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan golongan kepangkatan antara IVa-IVb. Selebihnya 18,2% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan golongan kepangkatan antara IIIa-IIIb.

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.2
Gambaran Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Kualitas laporan keuangan	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah.	0	0,0	0	0,0	31	47,0	28	42,4	7	10,6	3,64
2	Laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan penggunaan anggaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung.	0	0,0	0	0,0	21	31,8	34	51,5	11	16,7	3,85
3	Pos-pos anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya.	0	0,0	0	0,0	8	12,1	44	66,7	14	21,2	4,09

Lanjutan Tabel 4.2

No	Kualitas laporan keuangan	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
4	Penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.	0	0,0	0	0,0	23	34.8	36	54.5	7	10.6	3,76
5	Penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan struktur laporan tahun anggaran sebelumnya dan tidak berbeda dengan laporan keuangan pada instansi lain.	0	0,0	4	6.1	11	16.7	34	51.5	17	25.8	3,97
6	Struktur dan pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintah sehingga mudah dipahami dan dimengerti.	0	0,0	6	9.1	13	19.7	34	51.5	13	19.7	3,82
	Rata-rata											3,85

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.2 di atas menjelaskan kualitas laporan keuangan di SKPD lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,85. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan pada SKPD di Kota Banda Aceh menjawab setuju tentang kualitas laporan keuangan tersebut. Kalaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Baiknya kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh terutama didukung oleh indikator tingkat kehandalan dari laporan keuangan dengan nilai jawaban 4.09. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh menjawab setuju jika pos-pos anggaran yang

disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya.

Sementara penyajian laporan keuangan tepat waktu menjadi indikator yang masih lemah dari kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai jawaban 3.64. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun juga mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh menjawab setuju jika laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah.

4.2.2 Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Tabel 4.3
Gambaran Penerapan SIPD pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh

No	SIPD	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Perangkat keras komputer yang disediakan mencukupi untuk berbagai kepentingan Seksi/Subagian kerja.	0	0,0	0	0.0	25	37.9	35	53.0	6	9.1	3,71
2.	Perangkat lunak/Software SIPD dapat membantu memperlancar kinerja administrasi pengelolaan keuangan.	0	0,0	0	0.0	21	31.8	33	50.0	12	18.2	3,86
3.	SIPD memiliki ruang penyimpanan data yang berkualitas untuk menjaga arsip data dari kerusakan dan kehilangan.	0	0,0	0	0.0	21	31.8	33	50.0	12	18.2	3,86
4.	Prosedur penggunaan SIPD mudah dan tidak mengganggu waktu pekerjaan.	0	0,0	13	19.7	16	24.2	23	34.8	14	21.2	3,58

Lanjutan Tabel 4.3

No	SIPD	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
5.	Pegawai operator yang mengendalikan perangkat SIPD adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya.	0	0,0	4	6.1	21	31.8	34	51.5	7	10.6	3,67
	Rerata	3,74										

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.3 menjelaskan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterapkan pada SKPD di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,74. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan pada SKPD di Kota Banda Aceh menjawab setuju tentang SIPD tersebut. Kalaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Baiknya penerapan SIPD pada SKPD di Kota Banda Aceh terutama didukung oleh indikator software dan pengelolaan data dengan nilai jawaban masing-masing 3.86. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh menjawab setuju jika perangkat lunak/software SIPD dapat membantu memperlancar kinerja administrasi pengelolaan keuangan dan SIPD memiliki ruang penyimpanan data yang berkualitas untuk menjaga arsip data dari kerusakan dan kehilangan.

Sementara prosedur penggunaan SIPD menjadi indikator dari yang masih lemah dalam penerapan SIPD pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai jawaban 3,58. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator

lainnya namun juga mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan di lingkungan kerja pemerintah Kota Banda Aceh menjawab setuju jika prosedur penggunaan SIPD mudah dan tidak mengganggu waktu pekerjaan.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1) Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat pengukur dapat mengungkapkan gejala-gejala yang sebenarnya ingin diukur. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *korelasi product moment pearson*. Formulasi tersebut dapat memperlihatkan seberapa besar ítem pernyataan memiliki kesamaan sikap dalam membentuk sebuah variabel. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai korelasi semua ítem pertanyaan yang membentuk variabel penelitian lebih besar dari nilai tabel kritis *product moment* pada taraf signifikansi 5% adalah 0,244. Hasil Uji validitas dapat dilihat Tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 66	Keterangan
B1	Kualitas laporan keuangan	0,548	0,244	Valid
B2		0,574	0,244	Valid
B3		0,582	0,244	Valid
B4		0,526	0,244	Valid
B5		0,747	0,244	Valid
B6		0,690	0,244	Valid
C1	SIPD	0,924	0,244	Valid
C2		0,957	0,244	Valid

Lanjutan Tabel

Item Pernyataan		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 66	Keterangan
		0,957	0,244	Valid
C4		0,898	0,244	Valid
C5		0,558	0,244	Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua data dari variabel kualitas laporan keuangan yang dibentuk dari item pernyataan B1 sampai dengan B6, dan data variabel SIPD yang dibentuk dari item pernyataan C1 sampai dengan C5 memiliki nilai korelasi $> 0,244$. Dengan demikian semua pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid atau semua item pertanyaan yang dibentuk untuk pengumpulan data penelitian sudah dapat memberikan sebuah kebenaran dari apa yang terjadi.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah pengujian tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam suatu gejala atau kejadian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang belum memenuhi kestabilan dan berpotensi timbulnya ketidakstabilan akibat ketidakakuratan perancangan pernyataan atau responden yang terpilih untuk pengisian data tidak relevan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *Cronbach's Alpha*, dengan jumlah sampel 66 responden. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,60$. Hasil Uji reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.5.

Tabel. 4.5
Hasil Uji Reliability

No	Variabel	Jumlah Indikator	Nilai Alpha	Keterangan
1	Kualitas laporan keuangan (Y)	6	0,670	Handal
2	SIPD (X)	5	0,878	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.5 menjelaskan hasil uji reliabilitas terhadap 6 (enam) atribut pernyataan yang digunakan untuk membentuk variabel kualitas laporan keuangan (Y) dan 5 (lima) atribut pernyataan yang digunakan untuk membentuk variabel SIPD (X) diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,670 dan 0,878. Dengan demikian nilai-nilai dari atribut yang terlibat dalam variabel penelitian tersebut sudah memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* karena lebih besar dari nilai alpha 0,60. Dengan demikian seluruh data yang digunakan sudah dapat dipercaya atau sudah memiliki kesamaan pandangan (konsistensi).

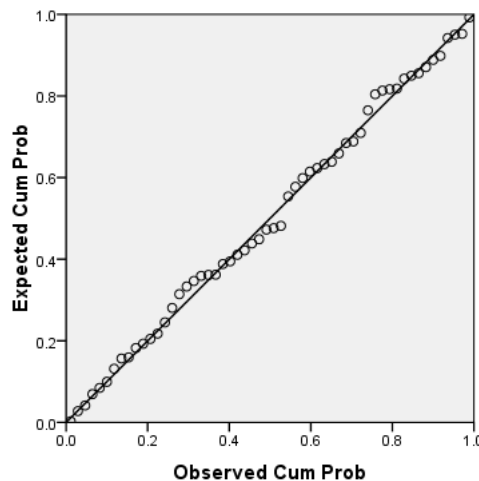
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1) Hasil Pengujian Normalitas.

Baik data skala SIPD (X) maupun kualitas laporan keuangan (Y) dalam penelitian ini harus mencerminkan data skala yang bebas dari pengganggu atau residual. Untuk menguji apakah distribusi nilai-nilai sampel pada variabel penelitian sesuai dengan distribusi teoritis, maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan gambar normal P-P Plot. Gambar ini menunjukkan sebaran *standardized residual* berada dalam kisaran garis diagonal seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Grafik P-P Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Kualitas Laporan Keuangan



Berdasarkan gambar normal P-P Plot di atas menunjukkan bahwa data observasi untuk kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah sebaran data sebanyak 66 dan seluruhnya masuk dalam kategori garis distribusi normal, sehingga seluruh data yang digunakan telah terdistribusi secara normal begitu juga untuk variabel SIPD sebagaimana Terlampir.

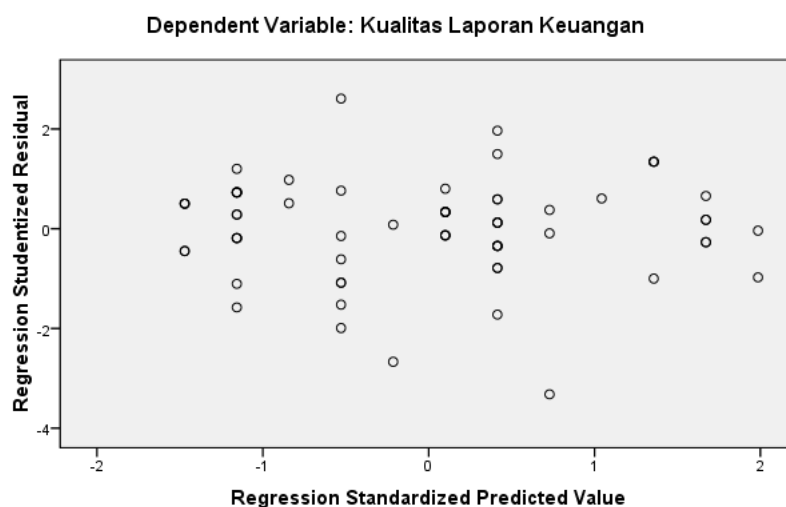
2) Heteroskedastisitas

Asumsi dari penggunaan data skala dalam model regresi linier berpotensi terjadinya gangguan (*disturbance*) yang di kenal dengan gangguan Homoscedastic. Homoscedastic terjadi jika data dari variabel SIPD (X), mempunyai varian yang sama dengan kualitas laporan keuangan (Y), sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan prediktif dimana yang seharusnya SIPD yang memprediksi perubahan pada kualitas laporan keuangan namun sebaliknya.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang

beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Sementara jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Output SPSS hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2
Scatter Plot Uji Heterokedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana terlihat dalam gambar diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar keatas dan dibawah 0, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh SIPD Terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuktikan dengan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi sejauhmana tingkat kenaikan interval dari variabel bebas yaitu SIPD (X), terhadap kenaikan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y) pada tingkat

kesalahan tertentu (*significansi*) atau dimana pengaruh antar variabel tersebut benar-benar nyata. Hasil output SPSS regresi linier sederhana pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat Tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Analisis Model Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,403	0,271	
	SIPD	0,388	0,071	0,562

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

4.4.1 Koefisien Regresi Linier Sederhana

Dari hasil output SPSS pada Tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,403 + 0,388X$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh adalah sebesar 2,403 menjelaskan jika SIPD (X), tidak mengalami perubahan atau tidak diterapkan, maka kualitas laporan keuangan (Y) di SKPD Kota Banda Aceh secara konstan berada pada posisi 2,403 satuan skala likert. Kondisi ini menandakan tanpa adanya SIPD kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh sudah tergolong baik.
2. Koefisien regresi pengaruh SIPD adalah sebesar 0,388, menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu satuan skala likert dalam penerapan SIPD maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD sebesar 0,388 satuan skala likert. Kondisi ini disebabkan karena SIPD yang didukung oleh

sistem komputerisasi (hardware, software dan jaringan online) dapat mendukung kecepatan, ketelitian, dan dapat mengelola volume data yang meningkat. Kondisi ini memungkinkan adanya pertimbangan alternatif-alternatif yang lebih baik dalam penyajian informasi (Sutabri, 2022: 46).

4.4.2. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara SIPD dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD memiliki hubungan yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien determinasi. Koefisien ini menjelaskan keeratan hubungan keseluruhan variabel bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1 sampai dengan +1 dan semakin masuk dalam kategori nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien determinasi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Kemudian dari hasil kolerasi dapat diketahui hasil korelasi determinasi (r^2) yang menjelaskan sejauhmana kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dari hasil out put SPSS pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,562	0,315	0,305

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Koefisien korelasi R sebesar 0,562 menjelaskan terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas SIPD (X), dengan kualitas laporan keuangan (Y) pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan keeratan 0,562 atau 56,2%. Hubungan tersebut tergolong sedang dengan koefisien keeratan hubungan masuk dalam kategori 0,40 – 0,599 (Sugiyono, 2012:250).

Koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,305 menjelaskan, peran variabel SIPD (X), dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebesar 0,315 atau 31,5%. Sementara sisa (nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,685 atau 68,50% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Kondisi ini menjelaskan peran dari SIPD masih sangat kecil dalam perubahan kualitas laporan keuangan sehingga masih banyak variabel lainnya yang mendukung kualitas laporan keuangan tersebut seperti kualitas SDM, etika, pelatihan serta Sistem Pengendalian Intern (SPIP).

4.4.3. Pembuktian Hipotesis

Untuk membuktikan adanya pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial), maka dilakukan uji t. Dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap dependen. Pembuktian hipotesis secara parsial dapat dijelaskan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Analisis Uji t

		Unstandardized Coefficients		t hitung	t tabel	Sig.
Model		B	Std. Error			
1	(Constant)	2,403	0,271	8,877	1,986	0,00
	SIPD	0,388	0,071	5,430	1,986	0,00

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai t hitung untuk pengaruh variabel SIPD terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 5,430 pada batasan nilai probabilitas 0,000. Sementara nilai t tabel pada tingkat kesalahan 5% adalah 1,986. Dengan demikian $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ sehingga hal ini dapat diterima, artinya SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini telah menimbulkan implikasi yang luas bagi semua pihak khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan penyempurnaan sistem SIPD karena sangat besar manfaatnya dalam memperlancar dan mengelola data transaksi keuangan yang akan disampaikan dalam laporan keuangan. SIPD sangat kuat dan signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. SIPD berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Banda Aceh dengan $t \text{ hitung } (5,430) > t \text{ tabel } (1,986)$ dengan nilai probabilitas $0,000 (<0,05)$.
2. Peran SIPD dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh adalah sebesar 0,315 atau 31,5% sementara sisa (nilai residu) sebesar 0,685 atau 68,5%, kondisi ini menjelaskan peran dari SIPD masih sangat kecil dan banyak variabel lainnya di luar model penelitian ini yang ikut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Banda Aceh tersebut.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka diberi saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperbaiki prosedur penggunaan SIPD yang masih terdapat beberapa kendala pada SKPD di Kota Banda Aceh sehingga pelaporan dan pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih baik lagi.
2. SKPD perlu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah di SKPD Kota Banda Aceh sehingga menggerakkan roda aktivitas kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

3. Untuk penelitian sebelumnya perlu menambah sejumlah variabel bebas yang lebih relevan dengan kualitas laporan keuangan seperti kualitas SDM, etika pejabat, kepatuhan pada peraturan dan sistem akuntansi, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fadillah (2019) *Penganggaran di Pemerintah Daerah: Dalam perspektif Teoritis, Normatif dan Emoiris*. Malang: UB Press.
- Anwar, Rapika (2021) *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher
- Ariana, Anak Agung Gede Bagus., Khas Sukma Mulya., I Kadek Dwi Gandika Supartha., Made Suci Ariantini., dan Ermanuri (2023) *Sistem Informasi Akuntansi (Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azaluddin · (2023) *Implikasi Managing Asset: Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Malang: Rena Cipta Mandiri
- Balqis, Nadya dan Zuhrizal Fadhil (2021) Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol. 7 No. 2. Hal: 117-121.
- BPK (2023) Warta Pemeriksaan: Hanya 23 Pemda Yang Belum Pernah Raih Opini WTP. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=41476>
- BPK (2023) Pemeriksaan Laporan Keuangan. <https://aceh.bpk.go.id/laporan-keuangan-2/>
- BPKP (2018). Pemahaman Sistem Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>
- Dewi, Novia Citra dan Selia Meriska (2018) Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*) - Vol 3, No 1 Hal 63-70.
- Dewi, P. Ayu Ratna dan Mimba, Ni Putu Sri Harta (2019) Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan *E-Jurnal Akuntansi* Vol 8 N0.3Hal 442-457.
- Dewi, Ni Kadek Novi Puspita,. Elin Erlina Sasanti., dan Nungki Kartikasari (2023) Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Vol 1 No 2. Hal 191-221
- Din, Muhammad (2021) *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

- Effendi, Syahril (2021) *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD Pemerintah Daerah*. Batam: Batam Publisher.
- Ekaputra, Nanda Dias (2021) Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk Nanda Dias Ekaputra. *Jurnal Otonomi* Vol. 21 Nomor 1. Hal 62-78.
- Fauzi, Aditya Ahmad., Budi Harto., Mulyanto., (2023) *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hendri, Meisy dan Erinos NR (2020), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1 Hal 2479-2493.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jauhari, Hadi,. Hazisma, Suhairi dan Dewata, Evada (2021) Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol 8 No. 1, Hal 104-120.
- Karunia, R Luki dan Azas, Mambrur (2023) *Akunatnsi pemerintah Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani, Lucki Bighandy, dan Entot Suhartono (2019) Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pemerintahan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* Vol 10 No 2, Hal 177-188.
- Masnila, Nelly (2021) *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok: Mitra Cendikia Media.
- Nadjib, Abdul (2023) *Keuangan Negara dan Daerah*. Indramayu: Adanu Abitama
- Nasution, Anwar (2012) *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi*, Jakarta: BPK RI
- Nasution, Muhammad Irfan dan Nurwani (2021) Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol 9, No 2 Hal . 109-116.

- Pasi, Novlentina, Abdul Kadir dan Isnaini³ (2017) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7 No 1. Hal 49-61.
- Permana, I Gede Yoga dan Ayu, Putu Sri Widnyani (2020) Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Sidoarjo: Zifatma Jawa.
- Rahman, Rakhmadi., Sutedi Sutedi., Zunan Setiawan (2023) *Pengantar Sistem Informasi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia
- Republik, Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik, Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik, Indonesia, *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*.
- Republik, Indonesia, *Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik, Indonesia, *Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Saputra, Anjas., Andreas Andoyo., dan Muhamad Muslihudin (2023) *Pengantar Konsep & Teori Smart Government*. Indramayu: Adanu Abimata
- Sekaran Uma dan Roger Bougie (2016) *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudipa, I Gede Iwan., Rakhmadi Rahman., dan Moch. Fauzi · (2023) *Penerapan Sistem Informasi Di Berbagai Bidang*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Vitriana, Nidya., Agustiawan., Muhammad Ahyaruddin (2022) Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal* Volume 1 No. 1 Hal 1-15.
- Widiasworo, Erwin (2018) *Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Araska

Yanto, Edi dan Akfir (2019) Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) *Indonesian Journal Of Strategic Management* Vol 3, Issue 1, Hal 44-58.

Yoraeni, Ani; Popon Handayani; Syifa Nur Rakhmah; Juarni Siregar; Dhian Yusuf Al Afghani; Harsih Rianto (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Scifintech Andrew Wijaya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Banda Aceh,

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr.....

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya :

Nama : Wildan Rahil Alfatta

NPM : 2002110088

Program Studi : Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh”**. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr selaku untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian.

Saat melakukan pengisian kuesioner ini, dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian kuesioner yang sudah tertera. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan sangat berharga dan bermanfaat bagi penelitian. Atas kerjasama, bantuan dan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Wildan Rahil Alfatta

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar di bawah ini:

1. Nama : Boleh Dikosongkan
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
 - ☐ SMA/Sederajat
 - ☐ Diploma 3
 - ☐ Strata 1
 - ☐ Strata 2
 - ☐ Lainnya
5. Lama Bekerja :
6. Bagian/Departemen :
7. Jabatan :

Petunjuk Pengisian :

1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuisioner ini.
2. Beri tanda centang (✓) pertanyaan berikut dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan serta penilaian yaitu :

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| STS | = Sangat Tidak Setuju | : Nilai 1 |
| TS | = Tidak Setuju | : Nilai 2 |
| KS | = Kurang Setuju | : Nilai 3 |
| S | = Setuju | : Nilai 4 |
| SS | = Sangat Setuju | : Nilai 5 |

KUESIONER

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH

A. Demografi Responden

1. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-50 Tahun
☐ >50 Tahun

2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan

3. Pendidikan : ☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
☐ S.3

4. Masa Kerja : ☐ 1-5 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ 26-20 Tahun

5. Gol Pangkat : ☐ IIIa-IIIb
☐ IIIc-IIId
☐ IVa-Ivb
☐ Ivc-Ivd

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek (√) pada angka pilihan:

B. Kualitas Laporan Keuangan		STS	TS	KS	S	SS
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.					
1.	Laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah.	1	2	3	4	5
2.	Laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan penggunaan anggaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung.	1	2	3	4	5
3.	Pos-pos anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya.	1	2	3	4	5
4.	Penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.	1	2	3	4	5
5.	Penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan struktur laporan tahun anggaran sebelumnya dan tidak berbeda dengan laporan keuangan pada instansi lain.	1	2	3	4	5
6.	Struktur dan pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintah sehingga mudah dipahami dan dimengerti.	1	2	3	4	5
C. Sistem Informasi Pemerintah Daerah						
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	STS	TS	KS	S	SS
1.	Perangkat keras komputer yang disediakan mencukupi untuk berbagai kepentingan Seksi/Subagian kerja.	1	2	3	4	5
2.	Perangkat lunak/Software SIPD dapat membantu memperlancar kinerja administrasi pengelolaan keuangan.	1	2	3	4	5
3.	SIPD memiliki ruang penyimpanan data yang berkualitas untuk menjaga arsip data dari kerusakan dan kehilangan.	1	2	3	4	5
4.	Prosedur penggunaan SIPD mudah dan tidak mengganggu waktu pekerjaan.	1	2	3	4	5
5.	Pegawai operator yang mengendalikan perangkat SIPD adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya.	1	2	3	4	5



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah Kp. Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh, Telp. 0651-22882 Fax. 0651-22882
 Email: bppk@bandaacehkota.go.id - website: bppk.bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 28 Juni 2024

Nomor : 800 / 714.2 / 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
 Muhammadiyah Aceh
 di-
 Banda Aceh

Sesuai dengan surat Saudara Nomor 661/UM.M7.FE/B/2024 Tanggal 21 Mei 2024 perihal Izin Penelitian dan Pengumpulan Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Wildan Rahil Alfatta
 NPM : 200110088
 Prodi : Akuntansi

Telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis/*Working Paper* (Skripsi) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh".

Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya dan terimakasih.

/Pih. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KOTA BANDA ACEH ¶



NELLA VANESSA, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. II
 NIP. 19790227 199711 2 001

Correlations

		Correlations						
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y
B1	Pearson Correlation	1	.012	.047	-.102	.565**	.391**	.548**
	Sig. (2-tailed)		.923	.707	.415	.000	.001	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
B2	Pearson Correlation	.012	1	.466**	.446**	.183	.136	.574**
	Sig. (2-tailed)	.923		.000	.000	.141	.277	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
B3	Pearson Correlation	.047	.466**	1	.484**	.136	.221	.582**
	Sig. (2-tailed)	.707	.000		.000	.276	.074	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
B4	Pearson Correlation	-.102	.446**	.484**	1	.192	.087	.526**
	Sig. (2-tailed)	.415	.000	.000		.122	.485	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
B5	Pearson Correlation	.565**	.183	.136	.192	1	.516**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.141	.276	.122		.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
B6	Pearson Correlation	.391**	.136	.221	.087	.516**	1	.690**
	Sig. (2-tailed)	.001	.277	.074	.485	.000		.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
Y	Pearson Correlation	.548**	.574**	.582**	.526**	.747**	.690**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	66	66	66	66	66	66	66

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	66	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.670	.669	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.6364	.67108	66
B2	3.8485	.68483	66
B3	4.0909	.57452	66
B4	3.7576	.63393	66
B5	3.9697	.82219	66
B6	3.8182	.85771	66

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.854	3.636	4.091	.455	1.125	.025	6

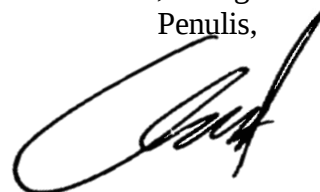
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	19.4848	5.454	.330	.383	.651
B2	19.2727	5.340	.357	.288	.643
B3	19.0303	5.507	.409	.344	.630
B4	19.3636	5.589	.316	.355	.655
B5	19.1515	4.377	.548	.475	.568
B6	19.3030	4.553	.451	.309	.611

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wildan Rahil Alfatta
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 Juli 2000
 - a. Jenis kelamin : Laki-laki
 - b. Agama : Islam
 - c. Kebangsaan suku : Indonesia/Aceh
 - d. Email : wildanrahilalfatta@gmail.com
 - e. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jln. Cinta Kasih Barat 10 No 32,
Panteriek
4. Nama orang tua
 - a. Ayah : Junaidi
 - b. Pekerjaan : Pns
 - c. Ibu : Rosnita
 - d. Pekerjaan : Pns
 - e. Alamat : Jln. Cinta Kasih Barat 10 No 32,
Panteriek
5. Riwayat pendidikan
 - a. SD Negeri 29 Banda Aceh : 2006-2012
 - b. SMP Negeri 1 Banda Aceh : 2013-2015
 - c. SMA Negeri 4 Banda Aceh : 2016-2018
 - d. Program Studi : Ekonomi, Prodi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Aceh, Tahun Masuk 2020 Sampai
Sekarang.

Banda Aceh, 23 Agustus 2024
Penulis,



Wildan Rahil Alfatta